



TATA KELOLA PROGRAM PENANGANAN COVID-19: PERAN DAN KESIAPAN KELURAHAN DALAM MENGHADAPI GELOMBANG PERTAMA COVID-19

¹Nikki Prafitri

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

nikki@untirta.ac.id

ABSTRACT

Governance is a pattern of interaction and program management with the involvement of other parties outside the government. Good governance can be done by implementing important aspects such as participation, accountability, transparency, and responsiveness. The Covid-19 pandemic is a global problem that requires handling from various lines of government, including the urban village as a street-level bureaucracy. The Covid-19 handling program is managed well because it increases Covid-19 cases and carries out major social obligations. The purpose of this study was to determine the governance of the Covid-19 handling program at the village level. The method used is the descriptive qualitative research method. The results showed that the governance of the Covid-19 handling program in the Banjaragung Urban Village was quite good, however, optimizing the success of its governance in managing leadership and the role of the urban village government, synergy between the urban village government and the community in preventing hoax news, assistance in assistance between the urban village government and the community and solid cooperation between the urban village government and the smallest units of government.

Keywords: *Governance, The Role of the Urban Village Government, Handling Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang disebut oleh WHO sebagai permasalahan global dan merata terjadi di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid-19 memaksa pengambil kebijakan untuk membuat produk kebijakan dalam masa yang singkat agar penanganan pandemi bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Produk

kebijakan juga diharapkan mampu mengendalikan penyebaran virus sekaligus menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19.

Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa pada April 2020 terdapat 213 Negara terjangkit Covid-19 dengan 2.858.635 orang terkonfirmasi positif covid dan sebanyak 196.295 orang meninggal dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah terkonfirmasi terdapat Covid-19 di wilayahnya yang ditandai dengan banyaknya penduduk yang terinfeksi virus Covid-19. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga april 2020 sebanyak 9.096 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, sebanyak 1.151 orang dinyatakan sembuh dan 765 orang dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19 ini.

Wilayah Indonesia yang terjangkit virus Covid-19 ini sudah tersebar di 34 provinsi dengan epicentrum kasus positif Covid-19 terbanyak pertama yakni berada di wilayah DKI Jakarta (3.869 kasus) dan kedua adalah wilayah Jawa Barat (951 kasus). Salah satu wilayah di Jawa Barat yang terkena dampak dan terjangkit virus Covid-19 adalah Provinsi Banten. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Banten tersebut juga tersebar di beberapa wilayah kabupaten dan kota. Epicentrum kasus terbanyak pasien positif Covid-19 berada di wilayah Kota Tangerang. Berikut merupakan data persebaran kasus Covid-19 di wilayah Provinsi Banten:

Tabel 1. Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/Kota Per 25 April 2020

No.	Kabupaten/Kota	Dirawat	Sembuh	Meninggal	Total
1.	Kota Tangerang	92	30	18	140
2.	Kota Tangerang Selatan	53	15	18	86
3.	Kabupaten Tangerang	57	7	5	69
4.	Kota Tangerang	2	0	1	3
5.	Kota Serang	2	0	1	2
6.	Kabupaten Pandeglang	0	0	1	1
7.	Kabupaten Serang	1	0	0	1
8.	Kabupaten Lebak	0	0	0	0
9.	Kota Cilegon	0	0	0	0

Sumber: infocorona.bantenprov.go.id

Data pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa epicentrum kasus pasien positif Covid-19 di Provinsi Banten berada di Kota Tangerang dengan total 140 kasus. Adapun sebagai Ibukota Provinsi Banten, Kota Serang justru hingga 25 April 2020 hanya terdapat 2 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Sebagai Ibukota provinsi, Kota Serang tergolong memiliki jumlah kasus positif yang sangat sedikit yakni sebanyak 2 orang. Berikut merupakan data persebaran kasus Covid-19 di Kota Serang :

Tabel 2. Peta Persebaran Kasus Covid-19 Berdasarkan Kecamatan di Kota Serang Per-25 April 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus ODP	Pasien Positif Covid-19	Pasien Sembuh	Pasien Meninggal
1.	Cipocok Jaya	71	1	0	0
2.	Curug	27	0	0	0
3.	Kasemen	18	0	0	0
4.	Serang	119	1	0	1
5.	Taktakan	43	0	0	0
6.	Walantaka	31	0	0	0
	Total	309	2	0	1

Sumber: infocorona.serangkota.go.id.

Data pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 2 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang, 1 orang di antaranya berada di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya dan 1 orang lainnya berada di wilayah Kecamatan Serang. Selain itu, melihat data persebaran ODP di Kota Serang, terdapat 119 orang yang berstatus ODP di wilayah Kecamatan Serang dan 71 orang berstatus ODP terdapat di Kecamatan Cipocok Jaya. Pemerintah berupaya mengeluarkan sejumlah kebijakan penanganan Covid-19. Terdapat dua kebijakan unggulan yang diklaim mampu mengatasi permasalahan Covid-19 diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan penyaluran BLT selama Covid-19, kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah, kebijakan *refocusing* anggaran pemerintah dengan memfokuskan pada penanganan Covid-19 dan kebijakan kartu prakerja.

Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 memerlukan tata kelola yang efektif dari berbagai pihak. Adanya pembatasan sosial membuat keberhasilan implementasi program cukup bergantung dengan peran dari tingkat *street level bureaucracy* seperti kelurahan. Hal ini karena adanya aturan pembatasan sosial, sehingga peran kelurahan sangat penting dalam mewujudkan tata kelola program penanganan Covid-19 yang baik. Kelurahan merupakan pihak yang dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Kelurahan Banjaragung sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya juga menjadi wilayah yang pada gelombang awal pandemi terdapat kasus positif dan ODP. Kelurahan juga tidak diberikan diskresi untuk menggunakan dana kelurahan dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya. Dengan demikian, studi ini akan terfokus pada tata kelola program penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan yakni di Kelurahan Banjaragung pada masa gelombang awal pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola program penanganan Covid-19 di Kelurahan Banjaragung.

B. METODE

Lokus dari penelitian ini adalah Kelurahan Banjaragung, Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang identik dengan metodenya melalui pertanyaan terbuka, data tekstual atau gambar (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Adapun sasaran atau informan dalam penelitian ini meliputi perangkat Kelurahan Banjaragung, Camat Cipocok Jaya, pihak RT/RW dan tokoh masyarakat sekitar. Teknik analisis data digunakan dengan model analisis interaktif dari Miles, et.al (2014) yang terdiri dari proses *data collection*, *data condensation*, *data display* dan *conclusions*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan setiap warga negara meliputi laki-laki dan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama terutama dalam proses pengambilan keputusan (secara langsung atau melalui perwakilan), proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan (Sedarmayanti, 2004; Rosidin dan Fajriani, 2003). Tata kelola penanganan Covid-19 menghendaki keterlibatan dari banyak pihak terutama masyarakat dan pemerintah kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Banjaragung telah berpartisipasi dalam penanganan penyebaran Covid-19 terutama pada proses penanganan pasien Covid-19 untuk diisolasi baik secara mandiri, maupun dirujuk ke rumah sakit. Kelurahan Banjaragung juga bekerjasama dengan Puskesmas terdekat untuk melakukan *rapid test* massal dan berkoordinasi manakala terdapat masyarakat yang ODP atau bahkan positif Covid-19.

Kelurahan Banjaragung pernah menjadi zona merah Covid-19 pada tahun 2020 dikarenakan banyak warganya yang terkena Covid-19. Hal ini dipicu oleh rata-rata penduduknya yang bekerja di luar Kota Serang, yakni di DKI Jakarta yang notabennya zona merah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok masyarakat sekitar, pihak Kelurahan Banjaragung juga aktif melakukan sosialisasi ke wilayah RT dan RW setempat untuk memastikan *tracing* dilakukan di tingkat RT dan RW, di perkampungan dan juga perumahan. Pihak RT dan RW juga secara rutin berkoordinasi dengan memanfaatkan media sosial dengan pihak kelurahan jika ada kasus positif Covid-19 dan memastikan penerapan protokol kesehatan di setiap wilayah.

Kendala yang terjadi dalam penanganan Covid-19 adalah partisipasi masyarakat terutama dalam hal kepatuhan untuk menjalani *rapid test* massal sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Pihak Dinas Kesehatan Kota Serang bekerja sama dengan Puskesmas melakukan bantuan *rapid test* di wilayah kelurahan yang ada di Kota Serang. Namun demikian, sering terjadi penolakan dari masyarakat di Kelurahan Banjaragung terutama masyarakat yang tinggal di perkampungan. *Rapid test* dilakukan ketika ada warga yang positif atau terindikasi ODP Covid-19 melakukan kontak dengan warga lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus pada saat gelombang pertama merebak. Alasan masyarakat menolak mengikuti *rapid test* adalah karena beredarnya berita hoax dan pemberitaan media yang negatif terkait *rapid test*. Masyarakat seringkali tidak melakukan cek terhadap *hoax* yang beredar. Tidak hanya itu, terkadang unsur tokoh masyarakat yang punya pengaruh dalam masyarakat juga menolak *rapid test* atau bahkan test PCR dikarenakan takut dan percaya akan *hoax* yang beredar.

Penerapan protokol kesehatan juga terkendala kepatuhan dan partisipasi masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat yang menolak menggunakan masker dan tidak percaya adanya Covid-19 serta menganggapnya sebagai sebuah kebohongan dan konspirasi. Edukasi yang minim terkait berita valid mengenai Covid-19 menjadi faktor masih banyaknya masyarakat yang tidak mau menggunakan masker atau bahkan mengikuti *rapid test* setelah diketahui berkontak dengan ODP atau orang yang positif Covid-19. Meskipun partisipasi pihak kelurahan sudah maksimal dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19, namun kepatuhan dan partisipasi masyarakat saat gelombang pertama pandemi Covid-19 sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan berita yang valid mengenai Covid-19 dan berita yang beredar melalui berbagai media sosial.

Kendala tersebut bisa diatasi dengan peran dari Lurah selaku pimpinan pemerintah kelurahan. Pihak Pemerintah Kelurahan Banjaragung juga terus berupaya memberikan edukasi akan kebenaran Covid-19 dan penitngnya menjaga protokol kesehatan. Hal ini guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Thoyib, et.al (2021) bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan tokoh masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19. Artinya aspek kepemimpinan dan peran pemerintah mengklarifikasi berita *hoax* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban stakeholder kepada publik berdasarkan peraturan serta komitmen akan mekanisme

pertanggungjawaban (Sedarmayanti, 2004; Rosidin dan Fajriani, 2003). Pemerintah tingkat kelurahan memiliki peran sebagai tempat pertama bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap penanganan Covid-19 dan juga informasi mengenai bantuan semasa Covid-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 berdampak bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah Kelurahan Banjaragung diketahui telah melakukan optimalisasi perannya dalam hal sosialisasi protokol kesehatan, menggalang kerjasama dengan Puskesmas, memfasilitasi bantuan *rapid test* melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Serang dan mendata warganya yang masuk dalam kategori penerima BLT pandemi Covid-19.

Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 juga dibentuk sampai di tingkat RW dan RT. Satgas Covid-19 dibentuk guna memaksimalkan penerapan protokol kesehatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertemuan selalu dilakukan untuk membahas kemajuan penanganan Covid-19 di wilayah Kelurahan Banjaragung. Pertemuan dilakukan juga sebagai langkah evaluasi peran dan kesiapan Pemerintah Kelurahan Banjaragung, Babinsa, Babinkamtibmas dan masyarakat yang diwakili oleh RT dan RW. Kesiapan seringkali terkendala permasalahan anggaran terutama dalam hal pengadaan. Misalnya pengadaan tempat cuci tangan, *handsanitizer*, penyemprotan desinfektan, bantuan pangan dan obat-obatan bagi warga terkena Covid-19. Bantuan yang didapatkan tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan di setiap wilayah. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut seringkali dilakukan dengan inisiatif swadaya masyarakat.

Inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan swadaya masyarakat ini merupakan bentuk akuntabilitas dan menunjukkan adanya rasa gotong royong bersama untuk mencegah penyebaran virus. Hirawan (2020) menyatakan bahwa dalam penanganan Covid-19 diperlukan sinergi baik horizontal maupun vertikal ditandai dengan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan perlu melakukan pemberdayaan pada unit terkecil pemerintah seperti RT, RW dan dusun. Pihak kelurahan sendiri mengaku terdampak *refocusing* anggaran dan kebijakan pemerintah untuk menggunakan dana kelurahan sesuai pagu kebutuhan dan tidak bisa dipergunakan untuk bantuan Covid-19 bagi warga. Akuntabilitas bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan adanya sinergi yang baik antara pihak kelurahan dan masyarakat ditandai dengan komunikasi, koordiansi dan kolaborasi.

3. Transparansi

Transparansi merupakan ketersediaan dan keterbukaan informasi serta kemudahan akses untuk mendapatkannya dalam rangka menjamin kebebasan aliran informasi guna meningkatkan kepercayaan antar stakeholder (Sedarmayanti, 2004;

Rosidin dan Fajriani, 2003). Transparansi menjadi isu yang sangat sensitif selama masa pandemi Covid-19 dikarenakan adanya kebijakan pemangkasan anggaran atau refocusing anggaran dan kondisi negara yang tengah menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial dan *lockdown* secara global. Aspek penting dalam konteks transparansi dalam studi ini adalah berkaitan dengan penyaluran bantuan pemerintah untuk warga terdampak Covid-19.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama pandemi menjadi kebutuhan yang sangat urgent dan dibutuhkan oleh kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran akibat kebijakan PHK dan dirumahkan oleh pihak perusahaan. Kota Serang juga cukup mengalami dampak PHK dan kebijakan dirumahkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Karyawan dengan status dirumahkan dan PHK Selama Pandemi Covid- 19 hingga di Kota Serang (per-September Tahun 2020)

Jenis Kelamin	Jumlah Karyawan (sebelum terdampak pandemi)	Jumlah Karyawan dirumahkan dan PHK (selama pandemi)	Jumlah Karyawan (setelah terdampak pandemi)
Laki-Laki	33.146	92	33.106
Perempuan	6.915	40	6.823
TOTAL	40.061	132	39.929

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah karyawan dari sektor perusahaan yang mengalami PHK dan dirumahkan lebih banyak terjadi pada karyawan laki-laki sebanyak 90 orang dan karyawan perempuan sebanyak 40 orang. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Lurah Banjaragung, dampak pandemi Covid-19 ini juga dirasakan oleh masyarakat yang pekerjaannya sebagai pedagang. Dengan demikian, BLT menjadi harapan bagi masyarakat terdampak untuk bisa digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa bantuan yang disalurkan selama pandemi Covid-19 di Kota Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Beberapa Program Pemerintah Kota Serang dalam upaya penanganan Covid-19 hingga September 2020

No.	Program	Pelaksana
1.	Pengadaan APD dan fasilitas pendukung protokol Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Serang
2.	Program <i>rapid test</i> massal per-kelurahan	Dinas Kesehatan Kota Serang bersama Puskesmas
3.	Penyemprotan desinfektan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan BPBD Kota Serang
4.	Bantuan beras 225 ton khusus petani	Dinas Pertanian Kota Serang
5.	Penyaluran BLT Rp.600.000,- dari pemerintah pusat	Dinas Sosial Kota Serang
6.	Penyaluran BLT Rp. Rp.500.000,- dari provinsi	Dinas Sosial Kota Serang

7.	JPS Rp.200.000,- dalam bentuk sembako	Dinas Sosial Kota Serang
8.	Bantuan Stimulus bagi UMKM Rp.500.000,-	Dinas Perdagangan Industri koperasi dan UMKM Kota Serang
9.	Program Serang Lawan Hoax	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang
10.	Bantuan Sembako khusus Karyawan dirumahkan dan terkena PHK di Wilayah Kota Serang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Serang telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan Covid-19 ini. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa terdapat 5 bantuan dalam bentuk bantuan uang dan pangan yakni bantuan beras 225 ton, BLT pemerintah pusat, BLT provinsi, (Jaring Pengaman Sosial) JPS Kota Serang dan bantuan bagi UMKM. Jenis bantuan yang memerlukan keterlibatan pihak kelurahan adalah BLT pemerintah pusat, BLT provinsi dan JPS Kota Serang. Peran dari kelurahan adalah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat yang dianggap layak mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria bantuan. Pendataan secara langsung dilakukan oleh RT dan RW dan kemudian diverifikasi oleh kelurahan agar tidak terjadi kesalahan dan penyalahgunaan penerima bantuan.

Hambatan dalam proses transparansi penerima bantuan adalah beberapa pihak RT dan RW yang salah dalam mendata warganya yang seharusnya mendapatkan bantuan. Pihak kelurahan juga memastikan tidak ada *nepotisme* dalam penyaluran bantuan agar tercipta transparansi dan keadilan. Pihak kelurahan membuka dialog pengaduan, jika warga merasa tidak puas dalam penyaluran bantuan. Seringkali ketidakpuasan ini dikarenakan warga yang didaftarkan justru tidak mendapatkan bantuan, karena dari hasil verifikasi diketahui tidak memenuhi kualifikasi penerima bantuan. Padahal menurut Hirawan (2020) penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan baik dan memperhatikan nilai *good governance* yakni transparan dan akuntabel.

Interaksi antara pihak kelurahan, RT dan RW pun dilakukan dengan baik pada saat pendataan maupun saat memberikan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan. Pihak kelurahan juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Serang apabila ada masyarakat yang masih bersikeras mendapatkan bantuan, namun secara aturan tidak memenuhi kualifikasi. Terkadang penerima PKH juga ingin mendapatkan BLT, padahal secara aturan tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan lain lagi. Selain itu, kendala lain adalah bahwa penerima JPS tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan lain. Padahal bantuan JPS dalam bentuk

sembako bernilai RP. 200.000,-, sedangkan BLT dalam bentuk uang tunai bernilai RP.500.000,-. Pihak Kelurahan Banjaragung bekerjasama dengan RT dan RW setempat selalu memberikan ruang pengaduan untuk menjelaskan kondisi perbedaan dan aturan pemberian bantuan yang ditentukan oleh pemerintah yang berwenang.

Kelurahan sendiri memiliki sumber dana yakni dana kelurahan. Namun demikian, dana tersebut tidak bisa dialokasikan untuk bantuan Covid-19 dikarenakan berasal dari APBD dan dikhususkan untuk infrastruktur kelurahan. Pemerintah kelurahan juga tidak diberikan kewenangan khusus untuk mengelola dana kelurahan secara otonomi. Hal ini yang membuat dana kelurahan tidak bisa dimanfaatkan untuk bantuan Covid-19 di wilayah kelurahan. Transparansi dalam hal ini sangat bergantung pada koordinasi aturan penyaluran bantuan antara pemerintah pusat hingga unit terkecil dari pemerintahan.

4. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan menanggapi dan mengenali kebutuhan masyarakat serta mengembangkan berbagai program pelayanan sesuai aspirasi masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh setiap institusi atau stakeholder (Sedarmayanti, 2004; Rosyadi, 2010). Pemerintah Kelurahan Banjaragung cukup responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi Covid-19 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan sebagai Satgas Covid-19 yang dekat dengan masyarakat. Kesiapan juga menjadi salah satu sub aspek dalam responsivitas. Kendala dalam responsivitas adalah kesiapan kelurahan dalam mendata pengajuan warga yang dianggap layak mendapatkan bantuan. Pemerintah Kelurahan mengeluhkan masa tenggat waktu yang terlalu singkat untuk mendata masyarakat yang jumlahnya begitu banyak dan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, sehingga sosialisasi tentang kualifikasi penerima bantuan tidak merata dipahami oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada adanya kesalahan pendataan dari tingkat RT dan RW dan variasi pemahaman kriteria penerima bantuan yang tidak sama.

Responsivitas juga dapat dilihat dari kesiapan pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, et.al (2021) menyatakan bahwa responsivitas pemerintah menentukan keberhasilan penanganan Covid-19. Selain itu, kemauan politik yang kuat, gaya kepemimpinan dan aparat birokrasi yang solid dalam melaksanakan berbagai program penanganan Covid-19 juga menentukan keberhasilan pencegahan penyebaran Covid-19. Aparat kelurahan sendiri sudah solid dengan unit pemerintahan terkecil dibawahnya yakni RT dan RW dalam merespon kebutuhan

masyarakat, baik terkait bantuan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Adapun berdasarkan data dari BPBD Kota Serang, sudah banyak kelurahan yang mendirikan program kelurahan tangguh bencana yang harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat saat bencana terjadi. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Kelurahan yang memiliki Program Tangguh Bencana di KotaSerang hingga Tahun 2020

No.	Kelurahan	Kecamatan
1.	Kepuren	Walantaka
2.	Panancangan	Cipocok Jaya
3.	Tinggar	Curug
4.	Mesjid Priyayi	Kasemen
5.	Bendung	Kasemen
6.	Banjaragung	Cipocok Jaya
7.	Cilowong	Taktakan
8.	Kasunyatan	Kasemen
9.	Pengampelan	Walantaka
10.	Terumbu	Kasemen
11.	Pipitan	Walantaka
12.	Kotabaru	Serang
13.	Kasemen	Kasemen
14.	Banten	Kasemen
15.	Sawah Luhur	Kasemen
16.	Margaluyu	Kasemen

Sumber: BPBD Kota Serang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 16 kelurahan yang mendirikan program kelurahan tangguh bencana, termasuk kelurahan Banjaragung. Program kelurahan tangguh bencana ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelurahan secara mandiri agar bisa beradaptasi dengan berbagai potensi ancaman bencana. Harapannya juga dengan program ini kelurahan bisa memulihkan diri dari dampak bencana. Program ini merupakan langkah responsif di kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini bisa dimanfaatkan untuk bencana alam karena masyarakat di Kelurahan Banjaragung sudah mendapatkan pengetahuan mengenai upaya preventif dan represif dari bencana alam seperti banjir. Namun, pengetahuan untuk upaya preventif dan represif bencana non alam, belum pernah dilakukan pada program ini. Dengan demikian, upaya kerjasama yang solid antara pihak kelurahan dengan masyarakat melalui RT dan RW dapat meningkatkan daya tanggap terhadap kejadian bencana non alam seperti pandemi.

D. SIMPULAN

Tata kelola progam penanganan Covid-19 di Kelurahan Banjaragung telah berjalan cukup baik, meski demikian masih terdapat kendala pada proses penyaluran BLT yang belum memuaskan masyarakat, anggaran yang belum memadai untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dan merebaknya berita hoax yang mempengaruhi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Keberhasilan program penanganan Covid-19 di Kelurahan Banjaragung dipengaruhi oleh aspek peran kelurahan dan gaya kepemimpinan kelurahan, sinergi antara pihak kelurahan dan masyarakat dalam pencegahan berita *hoax*, koordinasi dalam penyaluran bantuan antara pihak kelurahan dan masyarakat serta kerjasama yang solid antara pemerintah kelurahan dan unit terkecil dari pemerintahan. Saran yang bisa direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah kelurahan perlu memanfaatkan media sosial untuk mengatasi penyebaran hoax ditengah masyarakat. Selain itu, pemerintah kelurahan bekerjasama dengan BPBD setempat perlu melakukan pelatihan bagi upaya pencegahan bencana non alam agar program kelurahan tangguh bencana bisa dimanfaatkan pada situasi sulit seperti pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Brinkerhoff, Derick W. dan Arthur A Goldsmith. 2005. Institutional dualism and International Development a Revisionist Interpretation of Good Governance. *Journal of Administration and society*, Mei 2005; 37, 2; ABI/INFORM Global, page 199
- Creswell, John W. 2014. *Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat dalam Bahasa Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hirawan, Fajar, B. 2020. Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic. *CSIS Commentaries DMRU-081-EN / ECON-003-EN*, pp 1-7
- Kooiman, Jan. 2003. *Governing As Governance*. London : Sage Publications
- Miles, Matthew B, et.al. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Book 3 rd Edition*. Thousand Oaks, CA : Sage Publication.
- Nugroho, Latif Setyo. 2021. The Level of Community Compliance in Ponorogo Regency With The Covid-19 Health Protocol. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol.5, No. 1. Pp 78-87
- Rosidin, Abidarin dan Anggraeni Fajriani. 2003. *Reinventing Governance Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Rosyadi, Slamet. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta : Gava Media
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Sumarto, Hefifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor
- Syakrani dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Thoyib, Mastur.,et.al. 2021. The Relationship of Community Leaders and Social Cultural Environment with Community Participation in Management of Covid-19 in Tangerang City. *Linguistics and Cultural Review*. Vol. 5.No. S1. Pp 1009-1019
- Yusuf, M. et.al. 2021. Government Responsiveness in the Prevention of Spreading Covid-19: Vietnam and Indonesia in Comparison. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 25, Issue 1, pp 81-93